

ABSTRAK

Khairatun Hisanah Alpasa: 220211040092. Implementasi Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Upz Pada Masjid Di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, Tesis, Pembimbing 1 Prof. Dr. Zulfa Jamalie, MA, Pembimbing II Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Implementasi, Pembentukan UPZ, Tata Kerja

Pengelolaan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan salah satu upaya BAZNAS untuk meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara profesional dan terarah dengan dasar hukum yang ada. Namun, di Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Takisung, implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ di beberapa masjid masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi, fokus pengelolaan hanya pada zakat fitrah, dan pengawasan yang belum maksimal. Hal ini memunculkan permasalahan mengenai efektivitas kinerja UPZ dalam menyalurkan zakat secara optimal kepada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis empiris dengan metode deskriptif, yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di tiga masjid di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Data dianalisis secara tematik untuk menggambarkan proses pembentukan, tata kelola, kendala, serta dampak pengelolaan zakat oleh UPZ.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masjid belum mengimplementasikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara resmi sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Pembentukan UPZ. Hal ini tercatat 3 dari 10 masjid di kecamatan Takisung yang melaksanakan pembentukan UPZ. Pembentukan UPZ pada ketiga masjid telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan BAZNAS, dengan anggota yang dipilih oleh pihak masjid dan disahkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten. Tata kelola UPZ aktif dalam pengelolaan zakat fitrah yang dilaksanakan satu kali setahun, mencakup perencanaan, penerimaan, pendistribusian, dan pelaporan kepada BAZNAS. Meskipun demikian, UPZ masih bersifat pasif karena fokus hanya pada zakat fitrah, sosialisasi kepada masyarakat terbatas, dan pengawasan dari BAZNAS hanya dilakukan saat penerimaan dan pendistribusian. Kendala ini memengaruhi efektivitas pengumpulan zakat lain dan partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

Khairatun Hisanah Alpasa: 220211040092. Implementation of BAZNAS Regulation Number 2 of 2016 on the Establishment and Work Procedures of UPZ in Mosques and Prayer Halls in Takisung District, Tanah Laut Regency, Thesis. Supervisor 1: Prof. Dr. Zulfa Jamalie, MA. Supervisor 2: Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI, Postgraduate Program, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Keywords: Implementation, UPZ Establishment, Working Procedure

The implementation of zakat management through the Zakat Collection Unit (UPZ) is one of BAZNAS's efforts to enhance the collection and utilization of zakat in a professional and structured manner. However, the implementation of BAZNAS Regulation Number 2 of 2016 concerning the Establishment and Work Procedures of UPZ in several mosques and prayer halls still faces various challenges, such as limited socialization, a focus on managing only zakat fitrah, and supervision that is not yet optimal. These issues raise questions regarding the effectiveness of UPZ performance in distributing zakat optimally to the community.

This study employed a qualitative approach with a descriptive method, conducted through interviews, observations, and documentation in three mosques in Takisung District, Tanah Laut Regency. The data were analyzed thematically to describe the processes of UPZ establishment, governance, challenges, and the impact of zakat management.

The results indicate that the establishment of UPZ in the three mosques has been carried out in accordance with BAZNAS regulations, with members selected by the mosque authorities and approved by the Head of BAZNAS at the district level. UPZ governance is active in managing zakat fitrah, which is carried out once a year, covering planning, collection, distribution, and reporting to BAZNAS. Nevertheless, UPZ activities remain passive because they focus only on zakat fitrah, socialization to the community is limited, and supervision by BAZNAS is conducted only during the collection and distribution process. These challenges affect the effectiveness of collecting other types of zakat and community participation.